



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI TATA SURAT DINAS
ELEKTRONIK KABUPATEN SIDOARJO (E-BUDDY)
(Studi Kasus di Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo)

Diffa Izza Nadila
192020100080

Dosen Pembimbing :
Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan Latar Belakang

Permasalahan dalam pengelolaan surat

Dalam aktivitas ketatausahaan salah satu permasalahan yang kerap dirasakan oleh organisasi ataupun lembaga yakni pada pengelolaan surat- menyurat yang terkadang masih dilakukan secara offline atau manual, baik dari pendisposisian pesan, pendistribusian dan pengarsipan sehingga saat pemrosesan pesan memerlukan waktu yang lumayan lama, hal tersebut demikian juga dirasakan oleh salah satu lembaga pemerintahan yaitu pada Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong.

Landasan hukum dibuatnya aplikasi E-Buddy didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government

Kurniawan (Hardiyansyah (2011), menyatakan e-Governance didefinisikan sebagai kumpulan konsep untuk semua kegiatan sektor publik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk membuat proses pelayanan publik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi menjadi lebih transparan dan efektif.

E-Buddy

Aplikasi E-Buddy Sidoarjo merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk manajemen ASN yang ada di OPD Kabupaten Sidoarjo, mulai dari absensi, kegiatan, rapat, persetujuan surat dinas, disposisi surat dinas, hingga surat-menyurat yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga membantu pengolahan informasi yang ada melalui integrasi satu data dalam sebuah dashboard, sehingga instansi lain di bawahnya dapat lebih mudah melihat aktivitas ataupun kegiatan secara lebih transparan.

Pendahuluan Latar Belakang

Tabel 1. Rekapitulasi surat dinas pada akun E-Buddy Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong

No	Jenis Surat	Surat masuk			Surat Keluar			Disposisi		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		2020 November	2021	2022 Desember	2020 November	2021	2022 Desember	2020 November	2021	2022 Desember
1.	Surat Undangan	2	61	104	-	-	-	-	61	104
2.	Surat Umum	1	31	68	-	-	2	-	31	68
3.	Surat Edaran	1	8	11	-	-	-	-	8	11
4.	Surat Perintah Tugas	-	12	30	-	-	-	-	12	30
5.	Surat Perintah	-	10	21	-	-	-	-	10	21
6.	Surat Pengantar	-	-	5	-	-	-	-	-	5
7.	Surat Keterangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Surat Perjanjian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SPPD	-	1	-	-	-	-	-	1	-
10.	Pengumuman	-	14	39	-	-	-	-	14	39
11.	Berita Acara	-	1	23	-	-	-	-	1	23
12.	Laporan	1	8	25	-	-	-	-	8	25
13.	Piagam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Glagaharum, 2023

Pengelolaan surat dinas pada akun E-Buddy di Pemerintah Desa Glagaharum

Aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) telah diterapkan di Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan yang juga sebagai operator aplikasi, didapatkan informasi bahwa dalam pengimplementasian atau operasi aplikasi E-Buddy masih belum bisa secara maksimal dalam menggunakannya karena keterbatasan kemampuan adaptasi untuk penggunaan aplikasi. Selain permasalahan surat keluar yang menjadi masalah lain dalam pengoperasian aplikasi tersebut adalah disposisi, disposisi memang dilakukan dan semua surat akan di disposisikan kepada Kepala Desa dan Sekertaris Desa, akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan aplikasi tersebut disposisi yang dilakukan hanya untuk formalitas saja. Lalu untuk pencatatan atau rekap surat masuk dan keluar juga masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku besar

PENELITIAN TERDAHULU

Anggun P, dkk. Pada Tahun 2022

“ Penerapan *E-Government* dalam mewujudkan transparansi tata Kelola desa”

Penerapan e-Government dalam perwujudan transparansi tata Kelola pemerintahan studi kasus desa Bulu Timoreng, dapat dikatakan belum maksimal hal ini dikarenakan keterbatasan Perangkat pendukung. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan beberapa indikator diantaranya: Support (Dukungan), Capacity (Kemampuan), Value (Manfaat). Dalam salah satu indikator Capacity sudah cukup baik.

Khofifatul Ummah. Pada tahun 2023

“Implementasi *E-Government* Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (*E-Buddy*) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”

Implementasi e-Government melalui aplikasi E-Buddy pada desa Kajeksan. Menggunakan beberapa indikator seperti : komunikasi, Sumber daya, Disposisi (Sikap pelaksana) dan Struktur birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Vikri Aditya S, Indah M. dan Dinda R. pada tahun, 2022

“Inovasi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penggunaan E-Buddy”.

Pada Inovasi pelayanan BPBD, Kab.Sidoarjo dalam penggunaan E-Buddy. Menggunakan beberapa indikator seperti :Keunggulan Relative, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan dicoba, dan Kemudahan diamati . Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya di BPBD dirasah sangatlah efektif dan efisien. Dalam penggunaan juga sangat mudah dan dapat diakses dalam kondisi apapun

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN :

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

FOKUS PENELITIAN :

Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Tata Surat Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) Studi Kasus di Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori dari Indrajit 2002

INDIKATOR FOKUS MENURUT INDRAJIT (2002):

- A. Infrastruktur Legal
- B. Infrastruktur manusia
- C. Infrastruktur Teknologi

LOKASI PENELITIAN :

Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN:

Purposive sampling

TEKNIK PENGUMPULAN DATA :

Observasi
Wawancara
Dokumentasi

SUMBER DATA :

Primer
Sekunder

TEKNIK ANALISIS DATA :

Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Hubberman

- Pengumpulan data
- Mereduksi data
- Penyajian data
- Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur Legal

Infrastruktur legal dalam penerapan *e-Government* yaitu dapat ditinjau dari adanya lembaga atau penyedia layanan yang meliputi peraturan – peraturan atau legitimasi hukum dalam penerapan *e-Government*. Infrastruktur legal dari lembaga atau penyedia layanan membutuhkan kebijakan penerapan *e-Government*. Infrastruktur legal juga meliputi peraturan-peraturan penerapan *e-Government* dan dasar hukum. Dalam penerapannya Aplikasi E-Buddy memiliki landasan hukum pelaksanaannya yang diimbangi dengan regulasi yang ada. Aplikasi tata surat dinas elektronik kabupaten Sidoarjo atau *E-Buddy* dilandasi oleh kekuatan hukum melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik. Hal tersebut sejalan bersamaan dengan dibuatnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011 mengenai dasar Panduan tata naskah dinas berbasis elektronik di Lingkungan instansi Pemerintahan, Pengelolaan tata surat dinas elektronik ialah pengelolaan surat dinas yang dilakuakn secara elektronik serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur Manusia

Dalam pelaksanaan penerapan aplikasi E-Buddy di pemerintahan desa Glagaharum hanya dilakukan oleh 3 aparatur desa saja, yang terdiri dari operator aplikasi yakni kepala seksi pelayanan, sekertaris desa dan kepala desa. Pada aspek infrastruktur manusia ditemu beberapa permasalahan yakni kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tata cara penggunaan aplikasi, cara mengirimkan surat dan cara membuka disposisi surat. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada operator desa yang menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan adaptasi pada aplikasi tersebut membuat tidak efektifnya pemanfaatan aplikasi, selain itu beliau juga mengatakan keterbatasan kemampuan adaptasi juga dikarenakan kurangnya BIMTEK yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam hal ini sesuai dengan teori menurut Indrajit (2002) menjelaskan bahwa kebijakan penerapan *e-Government* tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan. Dan dengan adanya keterbatasan dalam pengoperasian aplikasi maka dapat dipastikan implementasi atau penerapan aplikasi tidak berjalan secara efektif.

Tabel 2. Yang berperan dalam aplikasi E-Buddy Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong

No	Nama Lengkap	Pendidikan	Jabatan	Umur	Pelatihan/Kompetensi
1	Achmad Thohirin	SMK	Kepala Seksi Pelayanan	42	Pelatihan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-Buddy (Zoom 2022) Pelatihan pengoperasian aplikasi E-Buddy (Kantor Kelurahan Porong 2022)
2	Zainul Taufiq	SMA	Sekretaris Desa	54	Pelatihan pengoperasian aplikasi E-Buddy (Kantor Kelurahan Porong 2022)
3	Mukhammad Saifulloh S.Si., M.Pd.I	S2	Kepala Desa	42	Pelatihan pengoperasian aplikasi E-Buddy (Kantor Kelurahan Porong 2022)

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Glagaharum 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur Teknologi

fasilitas penunjang penerapan e-governmnet melalui aplikasi E-Buddy yang berbasis website di Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Hardware yang tersedia yaitu Komputer Operator aplikasi E-Buddy, Komputer Kepala desa dan Sekertaris desa. Penggunaan hardware yang ada pada masing-masing perangkat desa dirasa cukup untuk melakukan aktifitas tata surat dinas berbasis elektronik pada aplikasi E-Buddy.

Tabel 3. Fasilitas Penunjang penerapan e-Governmnet Melalui Aplikasi Tata Kelola Surat Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) di Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

No	Jenis Perangkat	Jumlah
1	Komputer Lenovo IC5-141OB6	3
2	Printer Epson L3210	1

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Glagaharum 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan di atas tentang Penerapan *e-Government* melalui Aplikasi Tata Surat Dinas Elektronik (*E-Buddy*) (Studi Kasus di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo) dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Indikator Infrastruktur Legal dalam penerapan aplikasi *E-Buddy* sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik, dan juga sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011 mengenai dasar Panduan tata naskah dinas berbasis elektronik di Lingkungan instansi Pemerintahan.
- 2) Infrastruktur Manusia yaitu Perangkat desa yang berperan dalam penggunaan aplikasi *E-Buddy*, masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat keluar yang dikirimkan melalui aplikasi, selain itu dalam hal pendisposisian surat belum dimanfaatkan secara optimal, dimana dalam penerusan disposisi surat tetap dilakukan pada aplikasi akan tetapi penyampaian surat masih melalui *Personal Chat*, dan secara langsung hal ini dikarena keterbatasan kemampuan adaptasi perangkat desa yang berperan dalam aplikasi *E-Buddy* terhadap aplikasi tersebut.
- 3) Infrastruktur Teknologi, pada infrastruktur teknologi pada sarana dan prasarana yang terdapat pada pemerintahan desa Glagaharum Kecamatan Porong, sudah memadai yakni tersedianya komputer beserta printer yang ada di masing-masing perangkat desa khususnya yang berperan dalam penggunaan aplikasi *E-Buddy*, Selain itu pendukung lainnya yakni Wifi yang stabil juga sudah memadai untuk melakukan proses pendistribusian Surat Dinas dan tata Kelola surat dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (*E-Buddy*).

Daftar Pustaka

- [1] Muh.Ikram Pro, “ARTIKEL SKRIPSI Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh : TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Oleh : Muh . Ikram Pro,’ 2019.” 2019.
- [2] V. A. Suryansyah, I. Murti, and D. Rahmadanik, “INOVASI PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN E-BUDDY.”
- [3] Umi Arifah, “TRANSFORMASI BIROKRASI MELALUI E-GOVERNMENT,” *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi*, vol. 4. No.2 Th 2020, 2020.
- [4] V. Wirawan, “Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.18196/jphk.1101.
- [5] R. Mutaqinah and T. Hidayatullah, “Implementasi Pembelajaran Daring (Program BDR) Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat”.
- [6] A. Pujilestari and I. R. Maksum, “Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta,” vol. 15, no. 2, pp. 211–220, 2022.
- [7] p. 110, 2018. Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones., “PERPRES Nomor 95 Tahun 2018,” 2018.
- [8] Ely Sukmana, “KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE DI ERA PANDEMI DI KABUPATEN SUMEDANG,” *JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, vol. Volume6, Nomor 2, no. April 2022, pp. 66–98, 2022.

Daftar Pustaka

- [9] Usmaedi, “EDUCATION CURRICULUM FOR SOCIETY 5.0 IN THE NEXT DECADE,” *Pendidikan Dasar Setiabudhi*, vol. Volume 4, 2021, [Online]. Available: <https://stkipsetiabudhi.e-journal.id/jpd>
- [10] K. Ummah and I. U. Choiriyah, “Implementation of E-Government through the Sidoarjo Regency Electronic Office Manuscript Application (E-Buddy) (Case Study in Kajeksan Village Government, Tulangan District, Sidoarjo Regency)”, doi: 10.33258/birci.v6i1.7494.
- [11] L. Muliawaty and S. Hendryawan, “PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG),” *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 11, no. 2, 2020.
- [12] D. Rahayuning Perwitasari and E. Resmawan, “Penerapan Electronic Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur,” 2020.
- [13] N. Bianto and I. U. Choiriyah, “Implementation of E-Government Through Dukcapil Via Online (Plavon) Service in Village,” *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, vol. 14, Nov. 2022, doi: 10.21070/ijccd2023855.
- [14] F. O. Wiralestari, “KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROSES PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PEMANFAATAN E-GOVERNMENT,” 2020.
- [15] M. E. S. Mustika, I. U. Choiriyah, and A. R. U.B, “The Implementation of E-government in the Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District),” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 10, no. 1, pp. 54–63, Apr. 2022, doi: 10.21070/jkmp.v10i1.1688.
- [16] N. Rachmatullah, F. Purwani, J. Sistem Informasi, F. Sains dan Teknologi, and U. Raden Fatah Palembang nugrahaa, “Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government”, [Online]. Available: <https://katadata.co.id/desysetyowati>
- [17] A. O. Tiarasani, “PENERAPAN APLIKASI SURAT ELEKTRONIK (SULEK) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA,” 2021.



TERIMA KASIH